

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI
PROVINSI RIAU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau*



OLEH :

DIA DWI LESTARI
NPM : 165110323

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI


Jalan Kaharuddin Nasution KM.11 No. 113 Marpoyan Pekanbaru
Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : DIA DWI LESTARI
NPM : 165110323
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Fakultas : EKONOMI
Judul Penelitian : ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(IPM) DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU

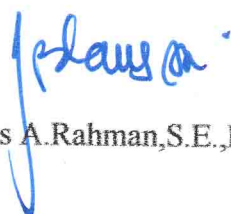
MENYETUJUI :

PEMBIMBING


(Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si)

MENGETAHUI :

DEKAN



(Dr. Firdaus A. Rahman, S.E., M.Si., AK CA)

KETUA JURUSAN



(Drs. M. Nur, M.M)

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU

OLEH:

DIA DWI LESTARI

NPM : 165110323

(Di bawah Bimbingan Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE, M.Si)

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar dan kompleks yang harus segera diatasi. Selain itu, kemiskinan juga dijadikan sebagai tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam suatu daerah. Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi. Tingkat kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau dan untuk mengetahui bahwa terdapat hubungan secara simultan antar variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) dari tahun 2010-2019, sedangkan metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan E-views 9.0. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau, Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau, serta terdapat hubungan secara simultan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau.

Kata kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran, dan Kemiskinan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX (IPM) AND UNEMPLOYMENT ON THE LEVEL OF POVERTY IN RIAU PROVINCE

BY:

DIA DWI LESTARI

NPM : 165110323

(Under the guidance of Dra.Hj. Ellyan Sastraningsih, SE, M.Si)

Poverty is a fundamental and complex problem that must be addressed immediately. In addition, poverty is also used as a benchmark for socio-economic conditions in measuring the success of development carried out by the government in a region. Riau province is one of the provinces with relatively high poverty rates. The poverty level is influenced by several indicators including the human development index (IPM) and unemployment. The purpose of this study is to find out how much influence the human development index (IPM) and unemployment have on poverty levels in Riau province and to know that there is a simultaneous relationship between variables. The data used in this study are secondary data obtained from the central statistical agency (BPS) from 2010-2019, while the analytical method uses multiple linear regression analysis with the help of E-views 9.0. the results of this study indicate that the human development index (IPM) has a negative and significant effect on poverty levels in Riau province, unemployment has a positive and significant effect on poverty levels in Riau province, and there is a simultaneous relationship between the human development index (IPM) and unemployment on poverty levels in Riau province.

Keywords : Human Development Index (IPM), Unemployment, and Poverty.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, petunjuk dan karunia-Nya yang menciptakan manusia dengan kelebihan akal untuk berfikir terhadap alam dan lingkungannya serta dengan perantara kalam, berkat inayah dan petunjuk serta kerja keras dan kesungguhan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU” guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Akan tetapi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis serta menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habbina wanabiyyana Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan mudah-mudahan syafaatnya kepada kita semua, Amin. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak kendala, akan tetapi akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Firdaus AR, SE, M.si. Ak, Ca KK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ialam Riau.
2. Bapak Drs. M. Nur, MM, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
3. Ibu Sinta Yulianti, SE., M.Ec selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
4. Ibu Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE, M.si sebagai pembimbing penulis.
5. Bapak-Bapak dan ibu-ibu dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dari Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau khususnya pada Jurusan Ekonomi Pembangunan.
7. Penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, terkhususnya untuk mamakku Neri Astuti, yang selama ini tidak pernah bosan memberikan semangat dan dukungan dalam memperoleh keberhasilan di bangku perkuliahan, serta alm bapak (Sumarno) dan alm adik (Bastian Sasmita), terimah kasih atas segala sesuatu yang pernah kalian lakukan untuk kakak, semoga kalian bangga atas pencapaian kakak saat ini.
8. Terima kasih untuk abang saya, Prasetio Anugrah yang secara tidak langsung sering memberikan masukan, semangat serta saran-saran selama dalam bangku perkuliahan.

9. Terima kasih untuk sahabat dan kawan seperjuangan ku: Mirawati, Afina, Fitri Nur Aisyah yang selalu memberi dukungan, bantuan serta semangat ketika dibangku perkuliahan maupun dalam proses mengerjakan skripsi.
10. Terimah kasih untuk teman-teman seperjuangan PEJUANG MERTUA. Sinta Ayu Pratiwi, Valetta Andini Putri, M. Krisdiantoro, dan Andri Buana Putra yang telah memberikan semangat, motivasi serta dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata,penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan semoga Allah SWT memberikan lindungan kepada kita semua.

Pekanbaru,

Penulis

DIA DWI LESTARI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 : Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 : Rumusan Masalah	8
1.3 : Tujuan Penelitian	9
1.4 : Manfaat Penelitian.....	9
1.5 : Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 : Telaah Pustaka.....	12
2.1.1 : Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	12
2.1.2 : Komponen Indeks Pembangunan Manusia.....	13
2.1.3 : Teori Pengangguran.....	16
2.1.4 : Teori Kemiskinan	19
2.1.5 : Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	21
2.1.6 : IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan	22

2.1.7 : IPM dan Pengangguran Terhadap kemiskinan.....	23
2.2 : Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 : Hipotesis.....	25
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 : Lokasi Penelitian.....	26
3.2 : Jenis Dan Sumber Data.....	26
3.3 : Populasi Dan Sampel.....	27
3.4 : Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5 : Definisi Variabel Penelitian.....	27
3.6 : Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
4.1 : Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau.....	34
4.2 : keadaan geografis Provinsi Riau.....	35
4.2.1 : Iklim Dan Curah Hujan.....	39
4.4 : Aspek Kependudukan Povinsi Riau.....	40
4.5 : Gambaran Sarana Pendidikan Di Provinsi Riau.....	42
4.6 : Gambaran Sarana Kesehatan Di Provinsi Riau.....	42
4.7 : Gambaran Perekonomian Di Provinsi Riau.....	43
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 : Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau..	45
5.2 : hasil olahan data.....	48

5.2.1 : Interpretasi Hasil.....	49
5.2.2 : Uji Asumsi Klasik.....	50
5.2.3 : Uji Hipotesis.....	54
5.2.4 : Koefisien Determinasi (R^2).....	55
5.3 : Pembahasan	
5.3.1 : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau.....	55
5.3.2 : Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau.....	57
5.3.3 : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Secara Simultan.....	57
BAB VI : PENUTUP	
6.1 : Kesimpulan.....	59
6.2 : Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :	Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau Tahun 2010-2019.....	5
Tabel 1.2 :	Jumlah Pengangguran Di Provinsi Riau Tahun 2010-2019.....	7
Tabel 2.1 :	Daftar Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4.1 :	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Riau Tahun 2019.....	41
Tabel 4.2 :	Jumlah Sarana Pendidikan Di Provinsi Riau Tahun 2018/2019.....	42
Tabel 4.3 :	Jumlah Sarana Kesehatan Di Provinsi Riau Tahun 2018/2019.....	43
Tabel 4.4 :	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau 2015-2018.....	44
Tabel 5.1 :	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran, Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2010-2019.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Riau Tahun 2010-2019.....3

Gambar 3.1 : Durbin Watson.....30



ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU

OLEH:

DIA DWI LESTARI

NPM : 165110323

(Di bawah Bimbingan Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE, M.Si)

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar dan kompleks yang harus segera diatasi. Selain itu, kemiskinan juga dijadikan sebagai tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam suatu daerah. Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi. Tingkat kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau dan untuk mengetahui bahwa terdapat hubungan secara simultan antar variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) dari tahun 2010-2019, sedangkan metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan E-views 9.0. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau, Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau, serta terdapat hubungan secara simultan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau.

Kata kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran, dan Kemiskinan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX (IPM) AND UNEMPLOYMENT ON THE LEVEL OF POVERTY IN RIAU PROVINCE

BY:

DIA DWI LESTARI

NPM : 165110323

(Under the guidance of Dra.Hj. Ellyan Sastraningsih, SE, M.Si)

Poverty is a fundamental and complex problem that must be addressed immediately. In addition, poverty is also used as a benchmark for socio-economic conditions in measuring the success of development carried out by the government in a region. Riau province is one of the provinces with relatively high poverty rates. The poverty level is influenced by several indicators including the human development index (IPM) and unemployment. The purpose of this study is to find out how much influence the human development index (IPM) and unemployment have on poverty levels in Riau province and to know that there is a simultaneous relationship between variables. The data used in this study are secondary data obtained from the central statistical agency (BPS) from 2010-2019, while the analytical method uses multiple linear regression analysis with the help of E-views 9.0. the results of this study indicate that the human development index (IPM) has a negative and significant effect on poverty levels in Riau province, unemployment has a positive and significant effect on poverty levels in Riau province, and there is a simultaneous relationship between the human development index (IPM) and unemployment on poverty levels in Riau province.

Keywords : Human Development Index (IPM), Unemployment, and Poverty.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era ini, globalisasi dijadikan sebagai hal yang menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat khususnya negara di dunia. Dengan segala Kondisi, masyarakat mau tidak mau harus menghadapi berbagai masalah global. Namun dalam kondisi ini, hal yang perlu ditekankan yaitu mengenai masalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri mempunyai peranan yang penting dalam aspek kehidupan, aspek politik, sosial termasuk aspek ekonomi. Dengan Pentingnya pembangunan ekonomi didalam perekonomian membuat sebuah negara berupaya membuat kebijakan yang berfokus ke pembangunan perekonomian, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang yang akan mengubah struktur ekonomi.

Pembangunan ekonomi dijadikan sebagai indikator utama bagi negara yang sedang berkembang. Secara sederhana pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya atau meningkatkan kualitas yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran semakin tinggi. Pembangunan ekonomi juga identik dalam menciptakan dan mempertahankan serta meningkatkan pendapatan nasional. Akan tetapi menurut kuncoro (2005), salah satu faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya ketertinggalan dan penghambat proses pembangunan dalam suatu negara adalah tingginya angka kemiskinan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang sering dikaitkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan seseorang. Menurut Rintuh (2003), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kesulitan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Terdapat dua jenis ukuran sebuah kemiskinan antara lain (1) kemiskinan absolut, yaitu kesulitan seseorang dalam melewati tingkat kemiskinan yang telah ditetapkan, (2) kemiskinan relatif, yaitu adanya perbedaan tingkat pendapatan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya.

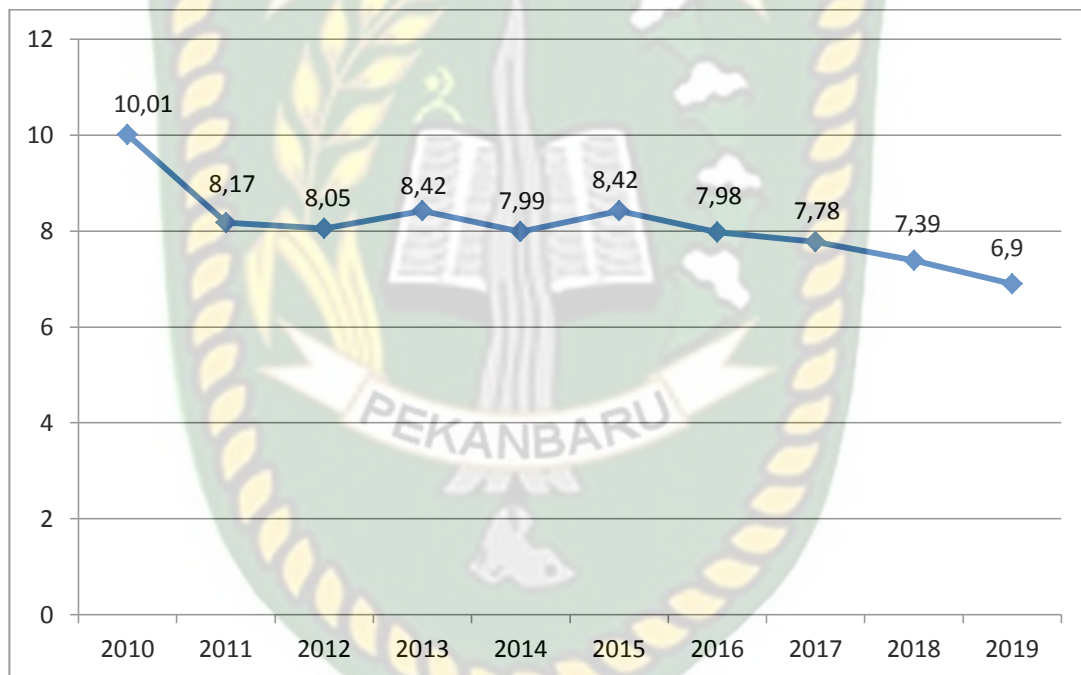
Menurut Todaro (2012) permasalahan kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensi yakni persoalan yang apabila tidak diatasi maka akan mempengaruhi atau memunculkan masalah baru yang menyangkut banyak aspek sebab berhubungan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, dan tingkat kesehatan yang rendah. Kemiskinan menjadi masalah yang mendasar ataupun hal yang menjadi permasalahan utama di setiap negara didunia, Khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia.

Pada lima tahun terakhir yakni tahun 2014-2018 persentase kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014 sebesar 10.96 %, kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 11.13 %, akan tetapi mengalami penurunan seterusnya pada tahun 2016 sebesar 10.70 %, tahun 2017 sebesar 10.12, dan pada tahun 2018 sebesar 9.66 % (Badan Pusat Statistik Indonesia 2019).

Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi Di Indonesia juga menjadikan kemiskinan sebagai permasalahan yang utama akan tetapi belum mempunyai strategi

yang kuat untuk mengatasi kemiskinan. Menurut World Bank (2004) salah satu faktor terjadinya kemiskinan yakni karena adanya pendapatan yang rendah serta aset untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, minuman, tempat tinggal dan lain sebagainya. Setiap provinsi di Indonesia masing-masing mempunyai tingkat kemiskinan yang berbeda berdasarkan kondisi demografis, hingga kebijakan daerah termasuk di Provinsi Riau.

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Riau tahun 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2020

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Riau cenderung mengalami fluktuasi sejak tahun 2010 sampai 2015, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2016 sampai 2019 yakni sebesar 6.90 %.

keadaan tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa kemiskinan masih sulit untuk teratasi.

Indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia memiliki andil dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan. Kualitas hidup manusia yang baik akan menjadi faktor pendukung rendahnya jumlah penduduk miskin. Semakin tinggi tingkat indeks pembangunan manusia maka akan memperlihatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang yang semakin baik.

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan cerminan dari kualitas sumber daya manusia. pada saat ini kualitas sumber daya manusia dapat dikatakan rendah, hal tersebut dapat terlihat dengan sangat jelas di Provinsi Riau. Contohnya dalam hal pendidikan, masih banyaknya orang yang wajib belajar akan tetapi tidak bersekolah. Masalah tersebut disebabkan adanya biaya pendidikan yang mahal serta fasilitas dan pemerataan pendidikan yang kurang memadai. Rendahnya tingkat IPM akan menyebabkan rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan beberapa langkah-langkah untuk mencapainya yakni yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut Mulyadi (2012) peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan antara lain melalui pembangunan pendidikan yang dibarengi dengan pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang, pembangunan kesehatan dengan cara menumbuhkan budaya hidup sehat serta kualitas dari pelayanan kesehatan itu sendiri, sedangkan untuk penduduk miskin dalam rangka

meningkatkan kualitasnya dapat dilaksanakan dengan memberikan keterampilan praktis. Pembangunan manusia di Provinsi Riau terus mengalami kemajuan, hal tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau tahun 2010-2019

Tahun	Jumlah (Indeks)
2010	68.65
2011	68.90
2012	69.15
2013	69.91
2014	70.33
2015	70.84
2016	71.20
2017	71.79
2018	72.44
2019	73.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2020

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai 2019. Dimana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 73.00 %.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia yang bertumpu pada beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut menyangkut umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak

faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. kemudian untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indikator lain yang dapat yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau yaitu pengangguran. Pengangguran terjadi diakibatkan adanya ketidakseimbangan antara penyedia lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. pengangguran juga dapat terjadi walaupun jumlah jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi karena terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur. Pada saat ini Provinsi Riau dikenal sebagai provinsi yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah terkhususnya perkebunan kelapa sawit. Keadaan tersebut membuat banyak pencari kerja yang datang dari luar provinsi untuk memperoleh pekerjaan, namun kenyataannya lapangan pekerjaan tidak tersedia. Masalah pengangguran dapat mengakibatkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yakni masalah pokok makro yang utama (Kuncoro, 2013).

Menurut sukirno (2006) pengangguran dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat yang telah dicapai, yang akan menyebabkan rendahnya tingkat kemakmuran masyarakat. Apabila lapangan pekerjaan tidak dapat menyerap semua

angkatan kerja yang ada maka akan menambah jumlah pengangguran (Machmud, 2016).

Tabel 1.2 Jumlah Pengangguran Di Provinsi Riau Tahun 2010-2019

Tahun	Jumlah (jiwa)
2010	207.247
2011	149.941
2012	109.650
2013	143.817
2014	176.762
2015	217.053
2016	222.006
2017	184.564
2018	192.801
2019	183.698

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2020

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengangguran cenderung mengalami fluktuasi. tepat pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 183.698 jiwa.

jumlah pengangguran yang meningkat akan menimbulkan berbagai dampak pada proses pembangunan ekonomi. Supaya tidak terus berlanjut, pemerintah harus mengatasi pengangguran, sebab persoalan pengangguran adalah persoalan yang utama dan sensitif bagi kestabilan ekonomi dan keamanan suatu negara. Pengangguran dapat menimbulkan pengaruh yang sangat berbahaya jika tidak segera diatasi.

Pengangguran berpengaruh dalam bidang ekonomi, sosial, maupun secara individual pada pelaku pengangguran itu sendiri.

Dengan berbagai masalah yang ada, secara langsung akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Untuk melihat seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau?
2. Seberapa besar pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

- b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.
- c. Untuk mengetahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak antara lain:

- a. Memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam menyusun arah atau kebijakan yang berhubungan dengan kemiskinan di Provinsi Riau sehingga dapat digunakan sebagai program pembangunan yang lebih baik.
- b. Menjadi tambahan referensi, bahan, pedoman dan juga sebagai penyempurnaan penelitian ilmiah bagi peneliti berikutnya yang menyangkut penelitian yang sama.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, serta sebagai sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan pada Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Islam Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini agar pembahasan ini dapat dibahas lebih rinci dan sistematis maka penulis membaginya dalam enam Bab, dimana pada masing-masing bab yang

secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Dengan kerangka tulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

Pada bab ini dimasukkan tentang teori-teori pendukung mengenai masalah yang dibahas yang terangkum dalam tinjauan pustaka, serta mencantumkan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang berkaitan dengan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum yang berkaitan dengan keadaan geografis, iklim, pendidikan, kesehatan serta keadaan ekonomi di Provinsi Riau

BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang telah dipaparkan.

BAB VI : KESIMPILAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis sebagai sumbangan penulisan.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara yang meliputi tiga hal dasar yaitu: 1) Lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, 2) Pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas dan 3) Standar hidup yang diukur dengan konsumsi perkapita. Nilai indeks pembangunan manusia berkisar antara 0-100. Indeks pembangunan manusia memberikan suatu ukuran gabungan tipe dimensi tentang pembangunan manusia : panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, menengah dan ke jenjang perguruan tinggi), dan memiliki standar hidup yang layak (diukur melalui paritas daya beli/penghasilan). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Sebagai contoh, indeks pembangunan manusia tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas tentang untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan (UNDP, 2004).

Indeks pembangunan manusia adalah salah satu indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kualitas pembangunan manusia, baik dari segi akibatnya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) ataupun dari segi non fisik (intelektualitas). Pembangunan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik manusia terlihat dalam angka harapan hidup dan kemampuan daya beli, sedangkan dalam kondisi non fisik tercermin dari kualitas pendidikan masyarakat. Oleh sebab itu diharapkan suatu daerah yang memiliki tingkat IPM yang tinggi seharusnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dengan kata lain jika tingkat IPM tinggi, pastinya tingkat kemiskinan juga rendah.

2.1.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1. Indeks Pendidikan (IP)

Penghitungan indeks pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun keatas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

2. Indeks Harapan Hidup (Indeks Kesehatan)

Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan menunjukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses perhitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program mortpak. Untuk mendapatkan indeks harapan hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

3. Indeks Daya Beli (Indeks Pendapatan)

Kemampuan daya beli penduduk atau Purching Power Parity (PPP) adalah suatu indikator yang dipakai untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam mengukur indeks Pembangunan Manusia. Kemampuan daya beli ini lebih menggambarkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam mencukupi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB perkapita atau yang disebut dengan pendapatan perkapita. Untuk mengukur standar hidup layak, data PDRB perkapita tidak bisa digunakan karena tidak tepat untuk mengukur kemampuan daya beli penduduk. Oleh karena itu, perhitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi perkapita yang akan disesuaikan. Setelah dilakukan perhitungan pengeluaran

perkapita setahun yang disesuaikan. Adapun rumus umum yang sering digunakan secara umum antara lain:

$$IPM = 1/2(X_1+X_2+X_3)$$

keterangan:

X_1 = Indeks Pendidikan

X_2 = Indeks Harapan Hidup

X_3 = Indeks Daya Beli

Menurut Kuncoro (2010) indeks pembangunan manusia berguna untuk membandingkan kualitas pembangunan manusia baik antar daerah maupun negara. IPM digunakan untuk mengetahui apakah penduduk suatu wilayah memiliki kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan adanya masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang baik, produktifitas masyarakat akan naik sehingga akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya. Jika pengeluaran konsumsi meningkat maka tingkat kemiskinan akan turun.

Menurut Ginting (2008) pembangunan manusia di Indonesia umumnya dilakukan melalui pengentasan kemiskinan. Investasi dalam bidang pendidikan akan dan kesehatan akan penting bagi penduduk miskin daripada penduduk tidak miskin. Hal tersebut disebabkan karena merupakan aset utama bagi penduduk miskin.

Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah akan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

2.1.3 Teori Pengangguran

Pengangguran merupakan seseorang yang telah dikategorikan sebagai angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan akan tetapi tidak memperoleh pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1997 mengenai ketenagakerjaan pada tanggal 1 oktober 1998, tenaga kerja diartikan sebagai penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Perlu diketahui bahwa indonesia tidak menetapkan batas usia maksimum tenaga kerja, disebabkan indonesia belum memiliki jaminan sosial nasional. Menurut Rukmana (2012) tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Angkatan Kerja, yang merupakan bagian dari masyarakat yang bekerja, masyarakat yang menganggur serta sedang mencari pekerjaan.
- 2) Bukan Angkatan Kerja, yang merupakan bagian dari masyarakat yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya.

Todaro (2000) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional di nyatakan sebagai pendorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang semakin tinggi berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan menambah ukuran pasar domestiknya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi jumlah angkatan kerja yang dipakai dalam proses

produksi maka output hasil produksi akan mengalami kenaikan sampai waktu tertentu.

Pengangguran dapat dikatakan sebagai seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Oleh karena itu, Sadono Sukirno (2004) mengelompokkan pengangguran menurut keadaan yang menyebabkannya menjadi 3 bagian yakni:

- 1) Pengangguran Friksional, yakni pengangguran yang terjadi akibat tidak bertemunya antara pembuka lowongan kerja dengan pencari kerja yang disebabkan oleh kurangnya informasi , geografi dan lainnya.
- 2) Pengangguran Struktural, yakni pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan struktur perekonomian.
- 3) Pengangguran Konjungtur, yakni pengangguran yang terjadi akibat meningkatnya pengangguran alamiah.

Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mampunya pasar tenaga kerja menyerap tenaga kerja yang tersedia. Akibatnya muncul sekelompok tenaga kerja yang diuntungkan dalam aktivitas perekonomian. Hal tersebut merupakan akibat tidak langsung, dimana penawaran tenaga kerja telah melebihi permintaan tenaga kerja berdasarkan kesempatan kerja yang tersedia.

Menurut Edwards Dalam Lincoln (1997) , terdapat beberapa macam pengangguran antara lain:

- 1) Pengangguran Terbuka, yaitu adanya tenaga kerja yang sanggup dan menginginkan untuk bekerja akan tetapi tidak terdapat pekerjaan yang sesuai.
- 2) Setengah Menganggur, yaitu tenaga kerja yang bekerja secara penuh namun produktivitasnya rendah.
- 3) Tenaga kerja yang lemah, yaitu tenaga kerja yang bekerja secara penuh akan tetapi penghasilannya rendah disebabkan karena suatu penyakit.
- 4) Tenaga kerja yang tidak produktif, yaitu tenaga kerja yang produktif akan tetapi tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik.

Indikator yang sering dipakai untuk mengukur tingkat pengangguran yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka biasanya diartikan sebagai jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jumlah tersebut dipakai untuk mengidentifikasi banyaknya penawaran kerja yang tidak bisa terserap oleh pasar kerja disuatu daerah.

Tingkat pengangguran dinegara berkembang termasuk indonesia biasanya terlihat rendah, mulai dari tingkat upah yang rendah serta adanya sektor informal yang proporsinya sangat besar. Rendahnya tingkat pengangguran di indonesia biasanya disebabkan oleh penduduk termasuk penduduk miskin, dimana mereka rela melakukan pekerjaan apapun demi mendapatkan uang atau pendapatan untuk mempertahankan hidup.

2.1.4 Teori kemiskinan

Secara umum, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana tidak tercukupinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Menurut BPS (2019), kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). melalui konsep ini, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dihitung dari sisi pengeluaran.

Kemiskinan merupakan suatu standar hidup yang rendah maupun ketidakmampuan dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan tersebut diketahui melalui pendapatan yang rendah untuk mencukupi kebutuhan pokok maupun lainnya. Dari pendapatan yang rendah tersebut berakibat terhadap kemampuan seseorang untuk mencukupi standar hidup rata-rata antara lain standar kesehatan serta pendidikan. Menurut Todaro (2006) kemiskinan terjadi saat seseorang atau sekelompok orang tidak sanggup memenuhi kebutuhan ekonomi dan standar hidup tertentu.

Pemerintah Indonesia mempunyai konsep yang lebih jelas tentang kemiskinan. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 yaitu kemiskinan adalah persoalan yang kompleks, tidak hanya dalam hal terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, akan tetapi karena adanya ketiadaan hak dalam memperoleh kebutuhan pokok yang ada. hal tersebut meliputi tersedianya persediaan kebutuhan pokok yang baik serta cukup untuk dikonsumsi, jangkauan dari lokasi tempat tinggal, dari sisi harga, dan adanya jaminan ketersediaan sepanjang waktu dari kelangkaan.

Oleh sebab itu, pemerintah menganggap kemiskinan sebagai suatu masalah yang multidimensi, bukan saja terkait masalah kurangnya pendapatan dan sumberdaya ekonomi, akan tetapi juga terkait dengan non ekonomi antara lain kesehatan, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Hall Dan Midgley (2004) mengartikan kemiskinan sebagai keadaan kekurangan baik dalam hal materi ataupun sosial yang mengakibatkan seseorang hidup dibawah standar kehidupan yang layak atau suatu keadaan seseorang yang membandingkan tingkat kekurangan tersebut dengan individu lainnya. Kemudian menurut Suparlan (2004) menyatakan bahwa minimalnya terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menyatakan definisi tentang kemiskinan, (1) pendekatan Absolut, yaitu memfokuskan pada terpenuhinya kebutuhan fisik agar mampu hidup dengan layak, (2) pendekatan Relatif, yaitu kemiskinan ditetapkan berdasarkan taraf hidup relatif dalam masyarakat.

Secara lebih jelas, Todaro dan Smith (2006) mengemukakan dua kriteria dalam kemiskinan antara lain:

- a. Kemiskinan Absolut, merupakan kemiskinan yang dihubungkan dengan kondisi sejumlah masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar dimana mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil dibawah garis kemiskinan, artinya kemiskinan absolut dapat diketahui dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperoleh dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan seperti makanan, pakaian dan lain-lain.

- b. Kemiskinan Relatif, merupakan kemiskinan yang dihubungkan dengan ketimpangan sosial, yakni kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup masih berada dibawah masyarakat lainnya. semakin tinggi tingkat ketimpangan seseorang maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk yang digolongkan miskin.
- c. Kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan karena adanya ketimpangan pendapatan, disebabkan kebijakan pembangunan yang belum menyeluruh.

Menurut Nurkse (2006) terdapat dua lingkaran perangkap kemiskinan antara lain yang dilihat dari sisi penawaran dan permintaan. Jika dari sisi penawaran yakni tingkat pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah yang menyebabkan kemampuan menabung masyarakat rendah. Keadaan tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat pembentukan modal serta kekurangan modal. Sedangkan jika dari sisi permintaan yakni dinegara-negara yang sedang berkembang indikator untuk menanamkan modal sangat rendah, ditambah lagi dengan adanya luas pasar yang jenis barangnya terbatas. Hal tersebut disebabkan adanya pendapatan masyarakat yang rendah, yang berawal dari rendahnya tingkat produktivitas masyarakat itu sendiri.

2.1.5 Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

Terdapat hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dengan luasnya kemiskinan. menurut sebagian besar dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (Part Time) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan gaji

yang tetap disektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara golongan masyarakat kelas menengah keatas. Dengan demikian, salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal tersebut karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya sangatlah susah. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka.

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara antara lain:

- a. Apabila rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang artinya konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka masalah pengangguran akan secara langsung mempengaruhi tingkat pendapatan kemiskinan dengan tingkat konsumsinya.
- b. Apabila rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang artinya konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan

Indeks pembangunan manusia meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, serta angka standar hidup layak. Dengan kata lain indeks pembangunan

manusia dapat dikatakan sebagai gambaran dari kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor utama terjadinya kemiskinan. Menurut Mudrajad (2006) IPM berguna untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar daerah maupun negara. Berdasarkan komponen yang terdapat di dalam indeks pembangunan manusia, peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh. Selain itu perbaikan dalam kesehatan penduduk yang akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Apabila hal tersebut terjadi maka akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan pengeluaran untuk konsumsinya, saat pengeluaran untuk konsumsinya meningkat, maka hal tersebut mengindikasikan tingkat kemiskinan akan menurun. disisi lain rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan.

2.1.7 IPM dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Terdapat hubungan yang sangat erat antara IPM dan pengangguran dalam mempengaruhi kemiskinan. IPM menggambarkan terpenuhinya atau tidak salah satu hak masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, akses pendidikan, serta pendapatan. Jika hal tersebut terpenuhi maka produktivitas masyarakat akan meningkat atau kualitas sumber daya manusia akan membaik. Ketika sumber daya manusia telah membaik maka akan mempermudah dalam memperoleh pekerjaan sehingga pendapatan juga akan meningkat. Menurut Sukirno (2001) salah satu unsur yang

menjadi penentu kesejahteraan dalam masyarakat yakni tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai titik maksimum terjadi saat tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (Full Employment) dapat terpenuhi, serta dibarengi dengan adanya sumber daya manusia yang baik. Sehingga jika tidak bekerja atau menganggur akan mengurangi pendapatan. Keadaan tersebut dapat menyebabkan tingkat kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat yang dicapai akan memburuk.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dengan adanya Penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti mampu melihat perbedaan, kekurangan serta kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu berbentuk jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Ringkasan/Hasil
1.	Sussy Susanti, 2013	Pengaruh Produk Regional Domestik Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan Analisis Data Panel.	PDRB, Pengangguran , dan IPM berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data panel

2.	Ridho Andikha, 2018	Analisis Pengaruh PDRB, tingkat Pengangguran, dan IPM terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	PDRB dan Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Alat analisis menggunakan model regresi data panel yaitu Fixed Effect Model (FEM).
3.	M. Alhudori, 2017	Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi	Terdapat isu-isu strategis dalam pemerintahan di Provinsi Jambi yang tidak berbeda dengan pemerintah pusat terutama masalah Kemiskinan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, serta uraian-uraian dari konsep yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau
2. Diduga Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.
3. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran berpengaruh secara Simultan terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah sebuah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan serta menguji hipotesis penelitian.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami perkembangan yang begitu pesat dalam hal pembangunan maupun perekonomian.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari 2010 hingga 2019. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya dan diolah kemudian disajikan dalam bentuk penelitian ataupun jurnal-jurnal. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau yang meliputi:
 - a. Data Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) tahun 2010-2019
 - b. Data Pengangguran (Jiwa) tahun 2010-2019
 - c. Data tingkat kemiskinan (Persen) tahun 2010-2019

2. Serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian, seperti geogle, buku serta hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Populasi Dan Sampel

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga tidak memakai populasi dan sampel sebagai responden dalam penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka pengumpulan data yang dilakukan/diterapkan di dalam penulisan ini yaitu dengan cara teknik dokumentasi, artinya dilakukan dengan mendatangi langsung instansi-instansi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis juga mengadakan wawancara dengan pihak instansi terkait, setelah itu pihak instansi tersebut memberikan lembaran-lembaran data untuk penelitian (variabel-variabel yang di perlukan)

3.5 Definisi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi munculnya variabel dependen (terikat). Maka yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah:

a. Indeks Pembangunan Manusia (X_1)

Indeks pembangunan manusia merupakan suatu pengukuran yang digunakan untuk membandingkan sumber daya manusia melalui angka harapan hidup, angka melek huruf, serta standar hidup dalam suatu daerah maupun negara.

b. Pengangguran (X_2)

Pengangguran merupakan suatu keadaan seseorang atau kelompok yang tergolong dalam angkata kerja akan tetapi tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Dalam penelitian ini pengangguran dilihat dari ketidakseimbangan antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat munculnya variabel bebas. Maka yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kemiskinan (Y), dimana kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau kelompok tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam bentuk uang maupun barang tertentu. Dalam penelitian ini kemiskinan dilihat dimana seseorang mempunyai penghasilan dibawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan lain sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang layak untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Sedangkan alat pengolahan data yang dipakai menggunakan E-views 9.0. analisis data pada

penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X1), Pengangguran (X2), terhadap tingkat Kemiskinan (Y). Dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Kemiskinan (Persen)
 X₁ : Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)
 X₂ : Pengangguran (Jiwa)
 β₀ : Intersep
 β₁ : Koefisien Variabel Bebas
 ε : Variabel Gangguan

Secara ekonometrika model yang dinilai baik bila memenuhi semua kondisi ideal suatu model. Secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik
 - a. Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan dalam variabel bebas (*Independent*), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Pengujian ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai value inflation factor (VIF), apabila nilai VIF > 10 berarti terkena multikolinieritas, sebaliknya jika VIF < 10 berarti tidak terkena multikolinieritas.

b. Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar model regresi linear mempunyai korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Untuk pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson.



Gambar 3.1 Durbin Watson

Dasar pengambilan keputusannya dilakukan dengan melihat angka DW apabila:

1. Angka DW dibawah -2 berarti ada korelasi positif
2. Angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

c. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi data, penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki adalah data yang digunakan harus berdistribusi secara normal, maksud data

terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal sesuai dengan ketentuan. Untuk mengetahui normal atau tidaknya model regresi tersebut dapat dilakukan melalui 2 cara yakni:

1. Histogram residual, Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal yakni akan menyerupai lonceng maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, sedangkan yang tidak normal tidak menyerupai lonceng.
2. Uji Jarque-Bera, data terdistribusi secara normal apabila nilai JB > nilai Chi-Square, begitu pun sebaliknya jika nilai JB < nilai Chi-Square maka data tidak terdistribusi secara normal.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji tersebut dilakukan untuk mengukur apakah dalam model regresi mengalami perbedaan varians dan residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terkena heteroskedastisitas. Adapun Cara untuk mengetahui jika model regresi tersebut terkena heteroskedastisitas, dapat diketahui melalui nilai probabilitas R^2 . jika nilai prob. R^2 lebih kecil dari nilai Chi-Square maka tidak terkena heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai prob. R^2 lebih besar dari nilai Chi-Square maka model regresi tersebut terkena heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

a. Uji-T

Uji tersebut digunakan untuk mengetahui bahwa setiap variabel secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent (terikat). Adapun syarat-syaratnya antara lain:

- Prob < 0,05 maka H_0 ditolak
- Prob > 0,05 maka H_0 diterima

H_0 ditolak dan H_a diterima

- $Tt/2b : df = n-2 (Sa.0) > a_0 > tt/2b : df = n-2 (Sa. 0)$
- $Tt/2b : df = n-2 (Sa.1) > a_0 > tt/2b : df = n-2 (Sa.1)$

Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka (H_0 ditolak), artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel *independent* (bebas) dengan variabel *dependent* (terikat) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka (H_0 diterima), artinya terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel *independent* (bebas) dengan variabel *dependent* (terikat) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau.

b. Uji -F

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel *independent* (bebas) berupa indeks pembangunan manusia dan pengangguran secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependent* (terikat) yakni tingkat kemiskinan di Provinsi Riau, dengan ketentuan:

1. H_0 diterima, jika $F \text{ prob} > 0,05$ artinya secara bersama-sama variabel *independent* (bebas) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependent* (terikat).
 2. H_0 ditolak, jika $F \text{ prob} < 0,05$ artinya secara bersama-sama variabel *independent* (bebas) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependent* (terikat).
- c. Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi yang dinotasikan R^2 , merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi. Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variabel terikat dalam mempengaruhi variabel bebasnya. Kisaran nilai koefisien determinasi R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Model dikatakan semakin baik apabila nilai R^2 mendekati 1 atau 100% (gujarati, 2003).

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Sejarah Provinsi Riau

Provinsi Riau merupakan sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak dibagian tengah Pulau Sumatera, Provinsi yang terletak dibagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Pada saat ini, Provinsi Riau termasuk dalam salah satu Provinsi terkaya di Indonesia, dimana kekayaan tersebut berupa berbagai sumber alam yakni minyak bumi, gas alam dan lain sebagainya.

Sebutan Provinsi Riau berasal dari Portugis yaitu “Rio” yang berarti sungai. Yang kedua berasal dari kata “Riahi” yang berarti air laut. Kata tersebut diperkirakan berasal dari tokoh Sunbad Al Bahar dalam kitab Seribu Satu Malam. Yang ketiga mengatakan bahwa sebutan kata itu berasal dari penuturan masyarakat setempat, diangkat dari kata *riuh* atau *rioh*, yang berarti ramai, hiruk pikuk orang bekerja. Diperkirakan sebutan ini benar-benar berasal dari rakyat setempat, yakni orang Melayu yang hidup didaerah Bintan, yang saat ini masuk ke wilayah Kepulauan Riau. Nama itu diperkirakan telah ada semenjak Raja Kecik memindahkan pusat kerajaan Melayu dan Johor ke Ulu Riau, Bangkinang dan Rengat.

Awalnya Provinsi Riau merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah yang terdiri dari tiga residen yakni Jambi, Riau, dan Sumatera Barat sebagai pusat pemerintahannya. Kemudian Riau memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Tengah, dimana terdapat beberapa alasan penyebabnya antara lain:

1. Riau tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi sebab pemerintahan pusat berada di Sumatera Barat.
2. Terdapat perbedaan karakteristik daerah yang membuat pemahaman visi tidak dapat digabungkan.
3. Ada kesan bahwa pemegang kekuasaan di Sumatera Tengah selalu memaksakan diri di tiap kebijakan yang diambilnya

Provinsi Riau terbentuk berawal dari tingkat elit dan tokoh masyarakat Riau. Pada waktu itu masyarakat dari empat Kabupaten yakni Bengkalis, Kepulauan Riau, Indragiri serta Kampar sepakat untuk sama-sama membentuk Provinsi Riau. Lalu membentuk Panitia Persiapan Provinsi Riau (PPPR) saat Rapat Panitia Persiapan Provinsi Riau, 2-6 Desember 1995.

Kongres Rakyat Riau (KRR) ke-1 dilaksanakan di Pekanbaru pada 31 Januari-02 Februari 1956, masyarakat Riau telah menyetujui untuk dibentuknya Provinsi sendiri. Kemudian pada tanggal 09 Agustus 1957 di Bali, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang menyatakan bahwa pembentukan daerah-daerah tingkat satu yaitu Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Oleh karena itu, setiap tanggal 09 Agustus diperingati sebagai hari jadinya Provinsi Riau.

4.2 Keadaan Geografis Provinsi Riau

Provinsi Riau terletak pada posisi 01°05'00" Lintang Selatan - 02°25'00" Lintang Utara dari 100°00'00"- 105°05'00" Bujur Timur. Provinsi Riau memiliki luas 107.932,71 Km², dimana 81,11% sebagiannya merupakan wilayah daratan sedangkan sisanya adalah wilayah laut/perairan. Berdasarkan Geomorfologi,

daratan Riau dapat dibagi menjadi wilayah bagian timur yang didominasi oleh daratan bergelombang serta bagian barat yang merupakan dataran berbukit yang berasal dari gugusan bukit barisan. Keadaan Geomorfologi itu menjadikan wilayah Provinsi Riau bagian timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian barat yang merupakan hulu dari 15 sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di bagian timur.

Provinsi Riau mempunyai 4 (empat) sungai yang digunakan sebagai prasarana perhubungan seperti sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 m, sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6-8 m, sungai Kampar (400 km) serta sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6-8 m. Keempat sungai tersebut dibedakan menjadi daratan tinggi bukit barisan yang bermuara di Selat Melaka Serta Laut Cina Selatan dipengaruhi pasang surut laut.

Adapun batas-batas Provinsi Riau jika dilihat dari letaknya dengan Negara tetangga dan Provinsi lainnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara

Sedangkan batas-batas Provinsi Riau berdasarkan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kabupaten Kuantan Singingi

- Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
 - Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat
 - Sebelah Timur : Kabupaten Indragili Hulu
2. Kabupaten Indragili Hulu
 - Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
 - Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
 - Sebelah Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
 - Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau
 3. Kabupaten Indragili Hilir
 - Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
 - Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
 - Sebelah Barat : Kabupaten Indragili Hilir
 - Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau
 4. Kabupaten Pelalawan
 - Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Indragili Hilir
 - Sebelah Barat: Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
 - Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau
 5. Kabupaten Siak
 - Sebelah Utara: Kabupaten Bengkalis
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Pelalawan

- Sebelah Barat : Kota Pekanbaru
 - Sebelah Timur : Kabupaten Kepulauan Riau
6. Kabupaten Kampar
- Sebelah Utara : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
 - Sebelah Selatan: Kabupaten Kuantan Singingi
 - Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
 - Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan
7. Kabupaten Rokan Hulu
- Sebelah Utara : Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar
 - Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat
 - Sebelah Timur : Kabupaten Kampar
8. Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Utara : Selat Malaka
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Siak
 - Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai
 - Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau
9. Kabupaten Rokan Hilir
- Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis
 - Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Utara
 - Sebelah Timur : Kota Dumai

10. Kabupaten Kepulauan Meranti

- Sebelah Utara : Selat Malaka Dan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kabupaten Siak
- Sebelah Barat : Kabupaten Siak
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau

11. Kota Pekanbaru

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan

12. Kota Dumai

- Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir
- Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis

4.2.1 Iklim Dan Curah Hujan Provinsi Riau

Provinsi Riau termasuk beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1700-4000 mm per tahun yang disebabkan adanya musim kemarau dan musim hujan. Wilayah yang sangat sering ditimpa hujan pada tahun 2018 yakni di Kabupaten Rokan Hulu dengan dengan jumlah hujan 221 hari, kemudian

Kabupaten dengan jumlah hujan paling sedikit terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2018 di Kabupaten Kuantan Singingi dengan curah hujan sebesar 3.356,00 mm, lalu Kabupaten Kampar sebesar 2.702,00 mm, dan curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1.847,00 mm. Menurut catatan Stasiun Meteorologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru tahun 2018 mencapai 36,40derajat celcius dan termasuk yang tertinggi di Provinsi Riau sedangkan suhu udara terendah berada di Japura Rengat sebesar 21,20 derajat celcius.

4.3Aspek Kependudukan Provinsi Riau

Jumlah penduduk dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang sangat menentukan dalam kegiatan produksi, hal tersebut disebabkan karena penduduk adalah indikator dari tenaga kerja yang bekerja untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Menurut data di Biro Pusat Statistik Provinsi Riau, jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan hasil proyeksi yakni sebesar 6.814.909 jiwa di tahun 2018 yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 3.495.705 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 3.319.204 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 6.657.911 jiwa, maka jumlah penduduk meningkat sebesar 2.36%. kemudian rasio jenis kelamin di Provinsi Riau pada tahun 2018 sebesar 105,32, apabila angka itu di interprestasikan maka dapat dikatakan bahwa didalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk Provinsi Riau terbanyak terdapat di kelompok umur 0-4 tahun yang berjumlah 739.071 jiwa, sedangkan jumlah terendah berada di kelompok umur 75 ke atas yang berjumlah 56.012 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Riau Tahun 2019

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
0-4	376.965	362.106	739.071
5-9	355.559	340.109	695.668
10-14	325.681	308.403	634.084
15-19	304.878	290.995	595.873
20-24	298.100	289.069	587.169
25-29	311.747	301.049	612.796
30-34	292.150	282.676	574.826
35-39	274.310	267.065	541.375
40-44	257.871	238.041	495.912
45-49	215.570	193.123	408.693
50-54	167.891	149.811	317.702
55-59	124.141	111.857	235.998
60-64	85.642	76.819	162.461
65-69	51.380	47.528	98.908
70-74	28.536	29.825	58.361
75+	25.284	30.728	56.012
Jumlah	3.495.705	3.319.204	6.814.909

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2020

berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Riau di tahun 2019 sebanyak 6.814.909 jiwa, terdapat 3.495.705 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki serta 3.319.204 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Penduduk Provinsi Riau yang tersebar diberbagai kecamatan tersebut dibagi kedalam beberapa kelompok umur, dari yang muda sampai dewasa. Dalam tabel tersebut

diketahui jika penduduk provinsi Riau di dominasi oleh penduduk usia produktif atau penduduk yang mampu untuk bekerja.

4.4 Gambaran Sarana Pendidikan Provinsi Riau

lancar atau tidaknya pembangunan suatu daerah atau negara sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu penduduk maka akan berdampak positif bagi masa depan suatu negara. Dengan pentingnya pendidikan, maka tidak mengherankan jika pendidikan menjadi perhatian bagi pemerintah, terutama di Provinsi Riau. Gambaran secara umum jumlah sarana pendidikan yang ada di Provinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Sarana Pendidikan Di Provinsi Riau Tahun 2018/2019

No	Pendidikan/Sekolah	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	2.309
2.	Sekolah Dasar (SD)	3.653
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.142
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	440
5.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	286

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2020

4.5 Gambaran Sarana Kesehatan Provinsi Riau

Kesehatan merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan taraf hidup masyarakat atau kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Oleh sebab itu pembangunan di dalam bidang kesehatan sangat penting, karena bertujuan supaya semua kalangan masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau. Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan faktor

pendukung yang dapat di gunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dimana derajat kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. sarana kesehatan diperlukan dalam mengatasi masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, dimana hal tersebut akan menghasilkan dampak positif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi.

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Kesehatan Di Provinsi Riau Tahun 2018/2019

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum	59
2.	Rumah Sakit Khusus	3
3.	Rumah Sakit Bersalin	5
4.	Puskesmas	216
5.	Klinik/Balai Kesehatan	575
6.	Posyandu	5.512
7.	Polindes	330

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2020

4.6 Gambaran Perekonomian Provinsi Riau

Sampai saat ini indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat di dalam suatu daerah dengan tepat masih sulit untuk ditemukan, akan tetapi secara tidak langsung, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemakmuran tersebut yaitu dengan menggunakan angka pendapatan regional. Adapun manfaat dari pendapatan regional yaitu untuk mengetahui tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan

ekonomi, serta struktur perekonomian suatu daerah dalam periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui suatu indikator yakni Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan untuk tingkat nasional, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk tingkat regional (provinsi). Hasil PDRB Provinsi Riau disajikan dalam bentuk angka-angka yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau berupa angka pendapatan regional berdasarkan seri dari tahun ke tahun. Laju Pertumbuhan ekonomi dilihat melalui angka PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2015-2018

No	Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.	2015	0.22
2.	2016	2.18
3.	2017	2.68
4.	2018	2.34

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017. Dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 2.68 %, akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 2.34 %.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau

Pada saat ini usaha yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat supaya terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan pembangunan nasional diseluruh aspek kehidupan, baik material maupun spiritual. Pembangunan nasional bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mencapai hidup yang adil dan makmur serta spritual berdasarkan pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, serta berkedaulatan kerakyatan yang aman, tenteram, tertib, serta dinamis dalam bermasyarakat.

Lancar atau tidaknya pembangunan nasional termasuk pembangunan di dalam bidang ekonomi tergantung seberapa besar permasalahan yang paling mendasar dalam masyarakat dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan itu meliputi kemiskinan, pengangguran, buta huruf, dan lain sebagainya.

Dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan semata-mata tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja, karena pertumbuhan ekonomi hanya sebagai syarat perlu. Kemiskinan bukanlah suatu masalah yang terbentuk sendiri, akan tetapi disebabkan oleh hasil interaksi antar berbagai aspek yang ada di dalam kehidupan manusia terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, perlu

di kaji aspek-aspek bidang lainnya yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti pengangguran dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Tingkat kemiskinan di Provinsi Riau cenderung mengalami fluktuasi, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengangguran. Indeks pembangunan manusia merupakan cerminan dari kualitas sumber daya manusia, sedangkan pengangguran merupakan suatu keadaan seseorang atau kelompok yang tergolong dalam angkatan kerja akan tetapi tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.

Tabel 5.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2010-2019

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)	Pengangguran (jiwa)	Kemiskinan (%)
2010	68.65	207.274	10.01
2011	68.90	149.941	8.17
2012	69.15	109.650	8.05
2013	69.91	143.817	8.42
2014	70.33	176.762	7.99
2015	70.84	217.053	8.42
2016	71.20	222.006	7.98
2017	71.79	184.564	7.78
2018	72.44	192.801	7.39
2019	73.00	183.698	6.90

Sumber: Data Olahan, 2020

Indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau antara lain:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2019, dimana indeks pembangunan manusia tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 73.00 %. pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan yaitu angka tingkat kemiskinan diatas yang selalu mengalami perubahan, maka apabila indeks pembangunan manusia (IPM) terus mengalami peningkatan atau semakin membaik maka tingkat kemiskinan akan berkurang, karena meningkatnya angka indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan bahwa semakin berkualitas dan sejahteranya hidup seseorang.

2. Pengangguran

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa pengangguran di Provinsi Riau pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni berjumlah 222.006 jiwa, dimana jumlah pengangguran terendah terjadi pada tahun 2012 yang berjumlah 109.650 jiwa. Pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau yaitu angka tingkat kemiskinan di atas selalu mengalami perubahan, maka apabila pengangguran terus mengalami penurunan maka tingkat kemiskinan juga akan menurun, karena menurunnya jumlah pengangguran mencerminkan bahwa seseorang telah mampu memperoleh pekerjaan serta pendapatan.

5.2 Hasil Olahan Data

Untuk mengetahui pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau dapat dilihat berdasarkan hasil olahan dibawah ini:

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 02/23/20 Time: 16:36
 Sample: 2010-2019
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.17072	5.846512	7.555056	0.0001
X1	-0.542519	0.086186	-6.294778	0.0004
X2	0.012607	0.003665	3.439577	0.0108
R-squared	0.852498	Mean dependent var		8.111000
Adjusted R-squared	0.810355	S.D. dependent var		0.811863
S.E. of regression	0.353552	Akaike info criterion		1.001754
Sum squared resid	0.874994	Schwarz criterion		1.092529
Log likelihood	-2.008768	Hannan-Quinn criter.		0.902173
F-statistic	20.22853	Durbin-Watson stat		2.574476
Prob(F-statistic)	0.001233			

Sumber : Hasil Olahan E-Views 9

Berdasarkan hasil estimasi tersebut maka didapat fungsi persamaan sebagai berikut:

$$Y = 44,17072 - 0,542519X_1 + 0,012607X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diketahui pengaruh dua variabel bebas (Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran) terhadap variabel terikat (Tingkat Kemiskinan). Berdasarkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_1), serta Pengangguran (X_2) tersebut, ada yang berpengaruh positif dan negatif terhadap

Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Riau. Berikut akan dijelaskan mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan secara rinci.

5.2.1 Interpretasi Hasil

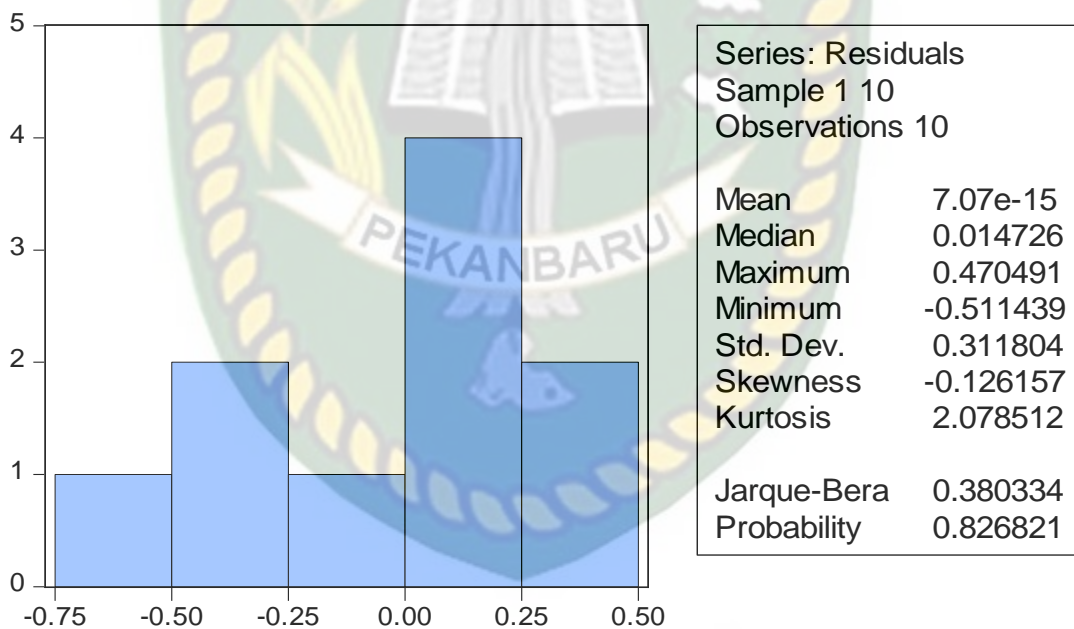
Berikut ini hasil persamaan tersebut yakni Indeks Pembangunan Manusia (X_1) dan Pengangguran (X_2) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Riau dengan analisis sebagai berikut:

- a. Konstanta b_0 : 44,17072 artinya besarnya tingkat kemiskinan di Provinsi Riau jika Indeks Pembangunan Manusia (X_1) dan Pengangguran (X_2) sama dengan 0 adalah sebesar 44,17072 persen.
- b. Nilai koefisien b_1 adalah sebesar -0.542519 dan berdasarkan uji T (parsial) berarti variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. Pengaruh tersebut artinya jika terjadi penambahan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,542519 persen.
- c. Nilai koefisien b_2 adalah sebesar 0,012607 dan berdasarkan uji T (Parsial) berarti variabel Pengangguran (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. Pengaruh tersebut artinya jika terjadi penambahan jumlah pengangguran sebesar 1 jiwa maka akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,012607 persen.

5.2.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam model regresi, variabel bebas dan variabel tidak bebas atau keduanya sudah berkontribusi secara normal atau tidak. Suatu model regresi dikatakan baik jika sudah mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati data normal. Untuk melihat apakah model regresi tersebut normal atau tidak, dapat diketahui melalui grafik histogram residual yang biasanya berbentuk lonceng apabila memiliki distribusi normal serta melakukan uji jarque-bera. Berikut grafik normalitas:



Sumber : Hasil Olahan E-Views 9

berdasarkan hasil estimasi regresi tersebut, diketahui bahwa grafik histogram residual tersebut tidak berbentuk lonceng maka kedua variabel tersebut memiliki

distribusi data yang tidak normal. Sedangkan jika dilihat menggunakan uji jarque-bera dapat diketahui bahwa nilai JB yaitu 0,380334 dan nilai chi square yaitu 14,017. Nilai JB lebih kecil dari Chi Square, dimana model regresi tersebut memiliki distribusi yang tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dipakai untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran. Jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran saling berkorelasi, maka hal itu tidak orthogonal. Dikatakan orthogonal, saat nilai korelasi antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran sama dengan nol. Pengujian tersebut dilakukan dengan melihat nilai VIF dengan ketentuan apabila nilai VIF >10 maka model ditemukan adanya multikolinearitas. Berikut gambar uji multikolinearitas:

Variance Inflation Factors
Date: 02/23/20 Time: 16:51
Sample: 2010-2019
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	34.18170	2734.555	NA
X1	0.007428	2964.876	1.207430
X2	1.34E-05	35.54730	1.207430

Sumber : Hasil Olahan E-Views 9

Dalam hasil pengolahan data, maka dapat dilihat nilai VIF dari variabel independen adalah VIF X_1 (Indeks Pembangunan Manusia) yaitu 1,207430 dan nilai VIF X_2 (Pengangguran) yaitu 1,207430. Dapat diketahui jika nilai VIF dari kedua variabel independen tersebut lebih kecil dari 10 yang berarti variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran tidak terkena multikolinearitas. Hal tersebut berarti antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran tidak mempunyai hubungan linear dalam model regresi tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengukur apakah pada model regresi terjadi perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik sebaiknya tidak terkena heteroskedastisitas. Cara mengatasi apakah model regresi tersebut terkena heteroskedastisitas atau tidak, dapat diketahui melalui nilai Chi Square (obs*R-Squared) serta nilai kritis Chi Square dengan syarat apabila nilai Chi Square lebih kecil dari nilai kritis maka terkena heteroskedastisitas. Berikut grafik uji heteroskedastisitas:

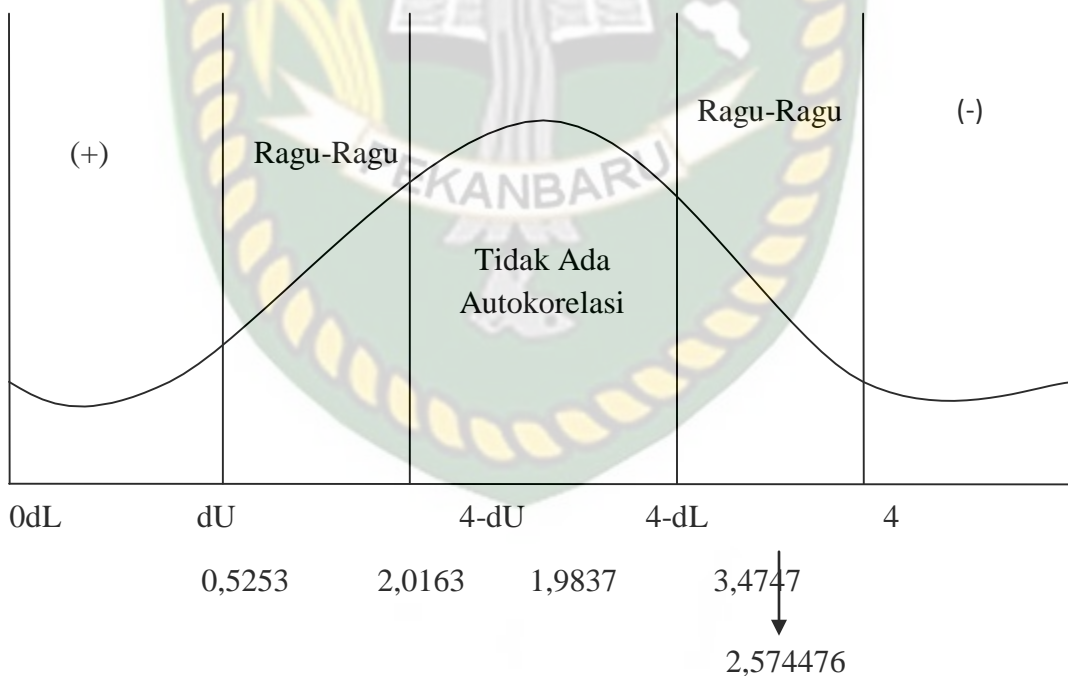
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.821450	Prob. F(5,4)	0.1684
Obs*R-squared	7.790940	Prob. Chi-Square(5)	0.1681
Scaled explained SS	2.058643	Prob. Chi-Square(5)	0.8410

berdasarkan hasil pengolahan data di atas, maka dapat diketahui nilai $obs \cdot R$ -Square yaitu 0,1681 sedangkan nilai kritis Chi-Square yaitu sebesar 14,017, sehingga dapat diketahui nilai $obs \cdot R$ -Square lebih kecil dari nilai kritis Chi-Square yang berarti model regresi tersebut tidak terkena heteroskedastisitas.

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi atau tidak antara variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Model regresi yang baik apabila terbebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Waston. Berikut gambar uji autokorelasi:



Sumber : Hasil Olahan E-Views 9

Berdasarkan hasil olahan data dapat dilihat jika nilai D-W sebesar 2,574476. apabila dilihat dari kurva D-W maka nilai tersebut berada diantara 2 sampai 4-dL, serta terletak pada kriteria ragu-ragu pada autokorelasi. Berarti dalam model regresi linear tersebut terdapat autokorelasi atau tidak ada autokorelasi.

5.2.3 Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara T signifikan dengan $\alpha 0,05$. Dengan syarat antara lain:

- Jika $\text{prob} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak
 - Jika $\text{prob} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima
1. Pengujian pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X_1) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Riau

Berdasarkan hasil uji T (Parsial), maka dapat dilihat melalui nilai probabilitas Indeks Pembangunan Manusia (X_1) yaitu ($0,0004 < \alpha 0,05$) maka H_0 ditolak, yang berarti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau.

2. Pengujian Pengangguran (X_2) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Riau

Berdasarkan hasil uji T (Parsial), maka dapat dilihat melalui nilai probabilitas Pengangguran (X_2) yaitu ($0,0108 < \alpha 0,05$) maka H_0 ditolak, yang berarti Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau.

b. Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Dengan syarat antara lain:

- Jika $F_{\text{Prob}} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak
- Jika $F_{\text{prob}} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima

Berdasarkan hasil uji F (Simultan) dapat diketahui bahwa uji F Prob sebesar $0,001233 < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, yang berarti bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau.

5.2.4 Koefisien determinasi berganda (R^2)

Koefisien determinasi berganda atau (R^2) berguna untuk menyelidiki seberapa besar variabel bebas (Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran) dapat menjelaskan variabel terikat (Tingkat Kemiskinan) untuk mengukur kebaikan suatu model. Berdasarkan hasil olahan dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah 0.852498. hal ini menunjukkan bahwa sebesar 85% Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran telah mewakili dalam menjelaskan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau, sedangkan sisanya 15% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

5.3 Pembahasan

5.3.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. Dimana nilai koefisien Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar -0,542519, yang berarti setiap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik sebesar 1 persen maka akan mengurangi Tingkat Kemiskinan sebesar 0,542519 persen. Ini artinya sebagian besar masyarakat yang ada di Provinsi Riau telah mengakses aspek pembangunan dengan cukup baik. Hal tersebut juga dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan cerminan dari kualitas sumber daya manusia (Pendidikan, Kesehatan, Dan Gizi). Ketika kualitas sumber daya manusia telah meningkat, maka akan menghasilkan tenaga kerja yang berpendidikan, berwawasan, mempunyai keterampilan yang bagus, serta sehat jasmani, maka produktivitas akan meningkat juga. Ketika produktivitas naik maka pendapatan akan naik, dimana dengan meningkatnya pendapatan akan menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridho Andykha (2018) yang menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkaitan dengan produktivitas. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Nurkse dalam Kuncoro (2006) yang menyatakan adanya ketertinggalan, ketidaksempurnaan pasar serta minimnya modal menyebabkan produktivitas rendah, akibatnya pendapatan yang

diperoleh juga akan rendah. Dengan adanya IPM yang baik maka akan meningkatkan daya beli sehingga akan meningkatkan output.

5.3.2 Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau.

Berdasarkan penelitian ini, Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Dimana nilai koefisien pengangguran sebesar 0,012607, yang berarti setiap jumlah pengangguran naik sebesar 1 jiwa maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,012607 jiwa. Hal ini terjadi karena provinsi Riau memiliki sumber daya alam yang menjanjikan sehingga menarik perhatian banyak orang untuk datang ke provinsi Riau guna untuk memperoleh pekerjaan. Hal lainnya dikarenakan ketika seseorang menganggur pastinya tidak akan memiliki pendapatan, sedangkan kebutuhan masyarakat yang tinggi dan bermacam-macam. Apabila mereka tidak bekerja maka tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya dengan baik, jika kebutuhan tidak terpenuhi dengan baik maka akibatnya akan menjadi miskin serta berkembangnya tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (2013) yang mengemukakan bahwa adanya permasalahan pengangguran berkaitan erat dengan kemakmuran masyarakat. Peningkatan kesempatan kerja melalui perluasan lapangan pekerjaan akan mengurangi tingkat pengangguran, sehingga tingkat kemakmuran masyarakat meningkat. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Alhudori (2017) yang menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

5.3.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Secara Simultan.

berdasarkan penelitian ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Riau dapat dipengaruhi oleh dua indikator tersebut. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin oleh tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkatkan produktivitas kerja manusia sehingga mereka akan mampu berinovasi dan menghasilkan pendapatan. Sedangkan pengangguran berdasarkan kenyataan, bahwa indikator tersebut terkait dengan pendapatan. Jika seseorang menganggur maka akan mengindikasikan bahwa mereka tidak mempunyai penghasilan. Hal ini sesuai dengan pendapat sukirno (2001) yang mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan melalui tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mencapai tingkat maksimum jika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud melalui sumber daya manusia yang baik, sehingga ketika tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan. keadaan tersebut akan dapat mengurangi tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat. Hal ini juga sesuai Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riana Puji Lestari (2017) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau, dengan nilai koefisien sebesar -0,542519 dan uji T dengan nilai probabilitas sebesar 0,0004. Keadaan ini menunjukkan bahwa kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Hal ini sesuai dengan hipotesis dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, saat Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan maka akan sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa produktifitas masyarakat di Provinsi Riau mengalami peningkatan. (lihat hal 48)
2. Variabel Pengangguran (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau, dengan nilai koefisien sebesar 0,012607 dan uji T dengan nilai probabilitas sebesar 0,0108. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Pengangguran mengakibatkan tingkat pendapatan masyarakat menurun sehingga tingkat

kesejahteraan masyarakat juga akan menurun. Ketika tingkat kesejahteraan menurun maka akan berpeluang terhadap tingginya tingkat kemiskinan. (lihat hal.48)

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau, dengan nilai F probabilitas sebesar 0,001233. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan teori yang dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. (lihat hal 48)

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya mampu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat atau mendorong masyarakat untuk berwirausaha, agar mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau
2. Pemerintah harus terus memberikan bantuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) sehingga UMKM dapat terus berkembang. Hal tersebut dikarenakan UMKM merupakan bidang usaha yang dapat menyerap tenaga kerja yang tergolong penduduk miskin yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah.
3. Bagi pemerintah Provinsi Riau hendaknya lebih tanggap dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, dengan memperhatikan indikator-indikator yang

dapat mempengaruhinya seperti dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran.

4. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan agar dapat menganalisis variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam serta data dan metode yang lebih lengkap, yang pada akhirnya mampu menyempurnakan hasil penelitian yang sudah ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Andykha, Ridho. 2018. *Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan ipm Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah*. 33(2):113-123
- Antony Hall & James Midgley. 2004. *Sosial Policy For Devolopment*. London: Sage Publications.
- Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi pembangunan*. Edisi Ketiga. STIE YPKN: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. 2019. *Data Kemiskinan Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2019, *Data Dan Informasi Penduduk Miskin Provinsi Riau 2009-2018*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2019, *Pengangguran Provinsi Riau 2009-2018*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2019, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau 2008-2018*
- Ginting s, Kunata. 2008. *Pembangunan Manusia Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. *Jurnal Perencanaan Dan Pembangunan* 4(1)
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Terjemah Sumarno Zein. Jakarta: Erlangga
- Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Machmud, Amir. 2016. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Alhudori, M. 2017. *Pengaruh IPM, PDRB, Dan Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi*. (1)1
- Mulyadi, S. 2012. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurkse, R. 2006. *Masalah Pembentukan Modal Di Negara-Negara Yang Kurang Berkembang*, Oxford Basic Blackwell.

- Puji Riana L. 2017. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rintuh, C.M. 2003. *kelembagaan dan ekonomi rakyat*. Dikti: jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2001. *Pengantar Makro Ekonomi Edisi II*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan) Edisi Kedua*. Penerbit Prenada Media Group: Jakarta.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Kemiskinan Di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Susanti, Sussy. 2013. *Pengaruh Produk Domestik Bruto, Pengangguran, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Jawa Barat*. STIE Ekuitas Bandung.
- Tambunan, Tulus T.H. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori Dan Temuan Empiris*. Jakarta: Graha Indonesia
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Didunia Ketiga, Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid I*. Jakarta: Erlangga
- Todaro, M.P & Smith, S.C. 2012. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesebelas. United Kingdom: Erlangga
- Todaro, M.P. 2013. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Todaro, M.P & Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan*. United Kingdom: Erlangga
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.
- UNDP, 2000. *Human Right And Human Development*. Oxford University Press. New York